

Media Komunikasi dan Inspirasi

JENDELA

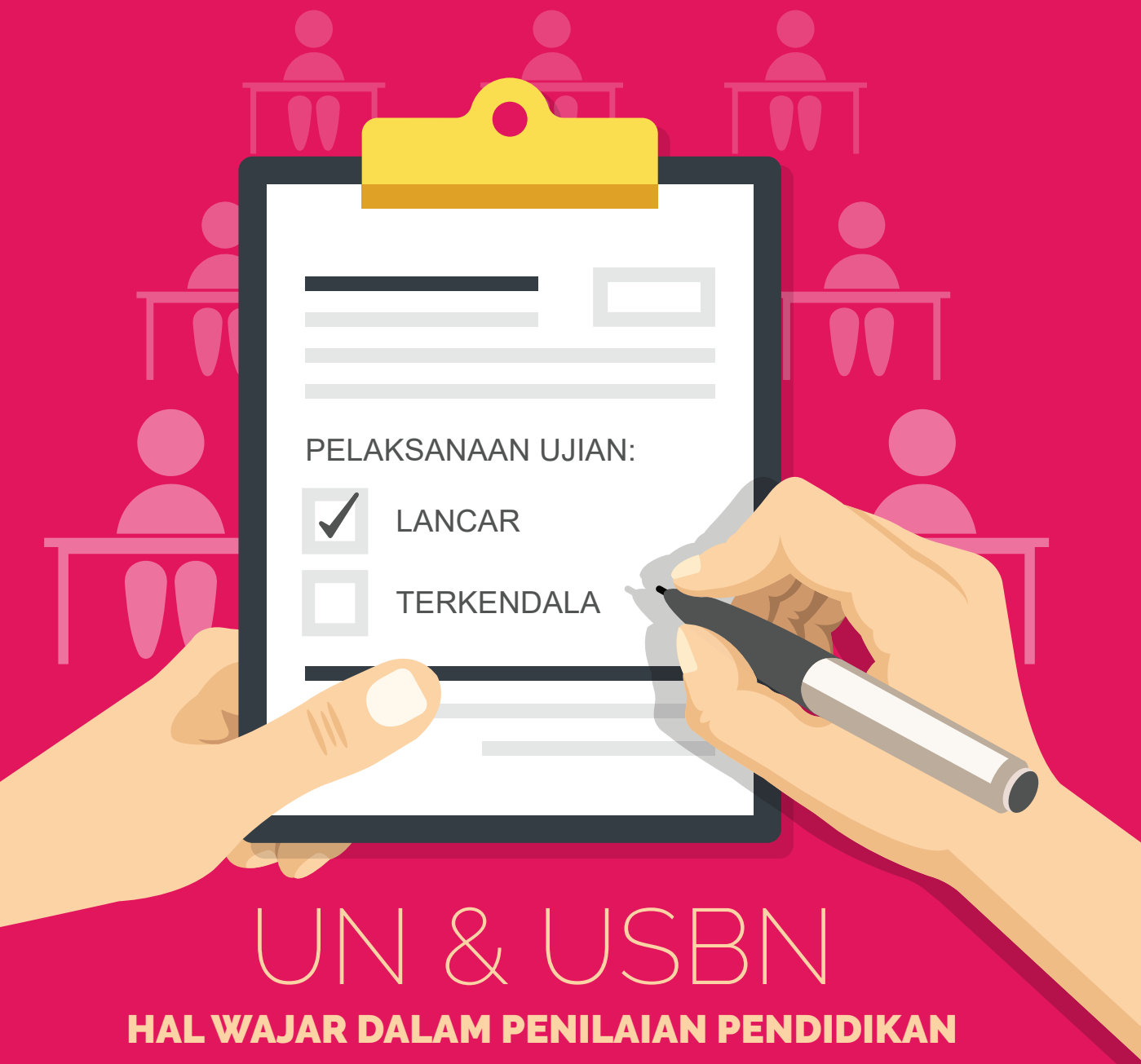
Pendidikan dan Kebudayaan

XXII/April - 2018

08 | Menuju 100%
Ujian Nasional
Berbasis Komputer

15 | Pertama Kali
USBN di Jenjang
Sekolah Dasar

26 | Libatkan Publik,
Indonesiana Lestarkan
Kearifan Budaya Lokal



UN & USBN

HAL WAJAR DALAM PENILAIAN PENDIDIKAN

Daftar Isi

04 Salam Pak Menteri

FOKUS

- 06 Tak Perlu Khawatir Hadapi UN dan USBN
- 08 Menuju 100% Ujian Nasional BerbasisKomputer
- 12 Isian Singkat Warnai Ujian Nasional 2018
- 15 Pertama Kali USBN di Jenjang Sekolah Dasar
- 18 Infografis Jadwal Ujian Nasional & Harapan Mendikbud
- 20 USBN Dorong Otonomi Guru
- 22 Saat Anak Hadapi Ujian, Orangtua Jangan Lakukan Hal-hal Ini

- 24 Resensi
Penguatan Pendidikan Karakter dalam Ciptakan Branding Sekolah

- 25 Infografis Perpustakaan
Katalog Induk Perpustakaan di Lingkungan Kemendikbud

- 26 Kebudayaan
Libatkan Publik, Indonesiana Lestarkan Kearifan Budaya Lokal

- 29 Kajian
Kenali Kendala Pelaksanaan Evaluasi Diri Sekolah

- 33 Bangsa Berbahasa Indonesia

Sapa Redaksi

HAL-HAL yang berbeda dari penyelenggaraan ujian nasional (UN) dan ujian sekolah berstandar nasional (USBN) 2018 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yakni: adanya soal isian singkat pada UN serta uraian singkat pada USBN, pelibatan guru dalam pembuatan soal USBN, peningkatan pelaksanaan UN dengan moda berbasis komputer, dan lainnya. Tahun ini juga merupakan kali pertama penyelenggaraan USBN bagi siswa Sekolah Dasar (SD) peserta USBN untuk beberapa mata pelajaran yang diujikan.

Melihat kebijakan-kebijakan baru tersebut, haruskah siswa merasa khawatir dalam menghadapi UN dan USBN? Apa saja yang perlu dilakukan orang tua dan guru untuk mendukung siswa menghadapi kedua ujian itu? Mengapa siswa SD harus mengikuti USBN tahun ini? Apakah siswa akan kesulitan menjawab ujian dengan adanya bentuk soal isian singkat pada UN dan uraian singkat pada USBN? Bagaimana pelibatan guru dalam membuat soal USBN?

Beberapa pertanyaan itu dapat pembaca temukan jawabannya di edisi kali ini yang membahas UN dan USBN 2018 secara komprehensif dan lengkap dengan infografis untuk mempermudah pembaca dalam memahaminya. Tak hanya itu, data pendukung pun dapat diketahui pembaca secara cuma-cuma. Kami berharap, beberapa **fokus** dalam edisi kali ini mampu memenuhi kebutuhan informasi pembaca tentang UN dan USBN 2018 melalui berbagai kebijakan baru dari pemerintah.

Resensi Buku berjudul "Cara Jitu Menciptakan Branding Sekolah Berbasis Karakter" yang ditulis oleh Ernaz Siswanto, kami sisipkan dalam edisi kali ini. Buku ini dapat menjadi referensi sekolah-

sekolah jika ingin menumbuhkan karakter siswa sesuai nilai-nilai kearifan lokal di daerahnya yang kemudian mampu menjadi penjenamaan sekolah atau *branding* sekolah tersebut.

Pada rubrik **Kajian**, pembaca dapat mengenali kendala-kendala pelaksanaan evaluasi diri sekolah (EDS) yang merupakan bagian dari penilaian sekolah. Melalui EDS, proses pemetaan mutu sekolah dilakukan oleh pihak sekolah sendiri secara jujur dan transparan agar dapat menemukan akar permasalahan yang dihadapi. Namun, hal ini ternyata masih mengalami berbagai kendala di lapangan dan artikel ini kami pilih agar pembaca mengetahui berbagai solusinya.

Jangan lewatkan rubrik **Kebudayaan** yang mengangkat tema Indonesiana, sebuah platform yang merangkai kegiatan-kegiatan budaya di Indonesia secara lebih sistematis dan bernilai jual tinggi bagi masyarakat dunia. Platform ini melibatkan kerja sama dengan pemerintah daerah, instansi terkait, lembaga filantropi, komunitas, dan pemangku kepentingan bidang pendidikan dan kebudayaan lainnya baik tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

Tak lupa kami hadirkan rubrik **Bangga Berbahasa Indonesia** yang berisi kata serapan atau kata yang tepat untuk penulisan. Rubrik yang disajikan lengkap dengan arti kata ini bertujuan agar pembaca semakin cinta terhadap bahasa Indonesia. Akhir kata selamat menjelajahi berbagai informasi tentang UN dan USBN 2018 dalam majalah JENDELA ini.

**Salam,
Redaksi**

REDAKSI

Pelindung:

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
Muhadjir Effendy

Penasihat: Sekretaris Jenderal, Didik Suhardi

Pengarah Konten: Staf Khusus Mendikbud, Nasrullah

Penanggung Jawab: Ari Santoso

Pemimpin Redaksi: Luluk Budiyo

Redaktur Pelaksana: Emi Salpiati

Staf Redaksi: Ratih Anbarini, Desliana Maulipaksi, Ryka Hapsari Putri, Agi Bahari, Rona Uly, Prima Sari, Dwi Retnawati, Denty Anugrahmawaty

Fotografi, Desain & Artistik: BKLM

Sekretariat Redaksi

Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM),
Kemendikbud, Gedung C Lantai 4,
Jln. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta,
Telp. 021-5711144 Pes. 2413



-  Kemdikbud.go.id
-  [Kemdikbud.RI](https://www.facebook.com/Kemdikbud.RI)
-  [@kemdikbud_RI](https://twitter.com/kemdikbud_RI)
-  [KEMENDIKBUD.RI](https://www.youtube.com/KEMENDIKBUD.RI)
-  [Kemdikbud.RI](https://www.instagram.com/Kemdikbud.RI)
-  jendela.kemdikbud.go.id

Salam Pak Menteri



Ujian Nasional (UN) dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) semata-mata diselenggarakan bukan tanpa tujuan, tetapi hal itu dilakukan untuk mengukur seberapa besar pencapaian kompetensi lulusan. Dalam sebuah proses pendidikan, ujian merupakan hal yang biasa dan wajar dilakukan oleh guru kepada siswa atau warga belajar se usai proses pembelajaran selesai. Siswa dan warga belajar pun tak perlu takut dalam menghadapi ujian tersebut, terlebih lagi UN sudah bukan menjadi faktor penentu kelulusan sejak tahun pelajaran 2015/2016 lalu.

PENYELENGGARAAN UN dan USBN juga terus diupayakan dan dilaksanakan dengan prinsip transparan, akuntabel, serta berintegritas tinggi, salah satunya melalui penggunaan moda komputer selama pelaksanaan ujian. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama terus mendorong pemerintah daerah, sekolah, serta pemangku kepentingan bidang pendidikan dan kebudayaan untuk mendukung pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) 100 persen di seluruh wilayah Indonesia.

Alhamdulillah, UN tahun ini dapat digelar kembali dengan sekolah yang melaksanakan UNBK sebanyak 96 persen untuk jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau yang sederajat dan 87 persen untuk jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat. Tercatat ada 17 provinsi yang menyelenggarakan UNBK jenjang SMK 100 persen dan 16 provinsi untuk jenjang SMA. Tahun 2019 mendatang, Kemendikbud menargetkan 100 persen penyelenggaraan UNBK untuk seluruh sekolah di jenjang SMA/SMK/sederajat.

Penyelenggaraan UNBK 2018 untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) memang belum mencapai 50 persen. Hal itu disebabkan banyaknya SMP yang berada di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) sehingga masih banyak kendala di lapangan untuk penyelenggaraannya. Mulai tahun ini, Kemendikbud akan memberikan afirmasi untuk SMP yang berada di daerah 3T tersebut agar dapat melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan komputer dan harapannya dapat menyelenggarakan UNBK di tahun depan.

Tahun ini Kemendikbud juga berupaya menegakkan otonomi guru terutama dalam hal evaluasi

pembelajaran melalui penyusunan soal-soal USBN. Pemberdayaan guru ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan profesionalisme guru secara berkelanjutan terutama dalam pembuatan soal. Semangatnya adalah penilaian untuk pembelajaran (*assemnet for learning*) bukan sekadar penilaian untuk pengajaran (*asseement for teaching*) sehingga menjadi hal yang esensial.

Pemerintah ingin guru-guru semakin memahami tentang standar isi dan standar evaluasi, terutama kompetensi lulusan yang diharapkan. Bukan sekadar apa yang diajarkan guru, tapi apa yang harus dimiliki oleh siswa saat mereka dinyatakan lulus. Pelibatan guru dalam hal pembuatan soal USBN ini dilakukan melalui komunitas guru yang tergabung dalam Kelompok Kerja Guru (KKG) dan atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Kemendikbud pun menggelar berbagai pelatihan bagi guru-guru untuk menyusun soal-soal ujian itu sebagai alat evaluasi belajar siswa.

Melalui UN dan USBN, kita sama-sama berharap agar kompetensi siswa setelah lulus semakin berkualitas dan memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi yang dibutuhkan untuk menjawab tantangan bangsa pada 20 hingga 30 tahun ke depan. Melalui guru, kita titipkan hal itu, generasi emas Indonesia mendatang ada di tangan guru-guru yang profesional.

Lebih dari itu, kejujuran adalah kunci utama kesuksesan generasi muda Indonesia di masa mendatang. Saya menyerukan kepada guru-guru agar dapat memberikan contoh bagi siswa untuk bersikap jujur dalam setiap tindakan dan kondisi yang dihadapi, termasuk dalam melaksanakan ujian. Prestasi memang penting, tetapi kejujuran jauh lebih utama. (*)

Tak Perlu Khawatir

Hadapi UN dan USBN

Pada 2018, siswa tingkat akhir di setiap jenjang pendidikan akan mengikuti ujian akhir, baik ujian nasional (UN) dan atau ujian sekolah berstandar nasional (USBN). Pelaksanaan UN dan USBN yang digelar setiap tahun ini sering kali dianggap sebagai “hantu menakutkan” bagi siswa yang hendak menghadapinya dan tak sedikit orang tua pun ikut merasa khawatir. Padahal ujian merupakan hal biasa dalam proses pendidikan serta merupakan satu dari delapan standar nasional pendidikan, yaitu penilaian pendidikan.

DALAM sebuah proses pendidikan, ujian atau biasa disebut sebagai “ulangan” oleh masyarakat awam adalah hal yang biasa dilakukan di sekolah. Sebut saja ketika siswa telah menuntaskan satu materi tertentu, guru akan menguji mereka dengan sejumlah soal tentang materi itu. Guru melakukan itu untuk melihat sejauh mana siswa memahami dan menguasai materi yang telah dia ajarkan. Begitu juga UN dan USBN semestinya diperlakukan sama, sehingga siswa tenang dalam mengerjakannya.

Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Teuku Ramli Zakaria mengatakan, sekolah, guru, orang tua, masyarakat, serta siswa perlu menghadapi UN dan USBN sebagai sesuatu yang biasa dan wajar. “Ujian merupakan suatu proses yang memang harus ada dalam pendidikan di mana pun itu. Hadapi UN dan USBN sebagaimana mestinya suatu ujian diselenggarakan,” tuturnya kepada *JENDELA*.

Ia menambahkan, UN dan USBN diselenggarakan bukan tanpa tujuan melainkan dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi lulusan. Bedanya, kata dia, UN hanya mengujikan sejumlah mata pelajaran tertentu, sementara USBN diujikan untuk seluruh mata pelajaran. “Kecuali untuk tingkat SD, USBN dilakukan hanya untuk tiga mata pelajaran,” jelas Akademisi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu.

Pentingnya UN juga diungkapkan oleh



Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy. Menurutnya, UN penting karena sebagai salah satu cara mengukur mutu pendidikan nasional. Ia mendorong pemerintah daerah memanfaatkan hasil UN untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerahnya masing-masing. “UN merupakan salah satu alat untuk melakukan refleksi yang memberikan gambaran mengenai capaian hasil belajar yang apa adanya, sehingga dapat digunakan untuk perbaikan,” ujar guru besar Universitas

Negeri Malang ini. Mendikbud juga menekankan untuk tidak khawatir dalam menghadapi UN, mengingat hasilnya sudah tidak lagi dijadikan sebagai penentu kelulusan. Hal ini diharapkan berpengaruh pada terbebasnya siswa dari beban psikologis, sehingga hasil UN bisa optimal. UN juga terus diupayakan dan dilaksanakan dengan prinsip transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi, salah satunya melalui penggunaan moda komputer selama pelaksanaan ujian.

Bahkan, Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, Jusuf Kalla saat hadir dalam Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2015 menekankan, jika sebuah bangsa ingin berhasil maka kerja keras adalah hal mutlak yang harus dilakukan. Namun, jika ada yang menganggap bahwa UN adalah pemicu stres dan rasa cemas maka bisa dipastikan bahwa orang tersebut bukan pekerja keras. "Berarti dia tidak belajar," ujarnya.

Wapres Jusuf Kalla mengajak pelaku pendidikan agar tidak menjadikan UN sebagai beban karena kelulusan 100 persen bukanlah target utama dan yang menjadi syarat utama untuk mendapatkan UN kredibel adalah disiplin. Jika budaya "mendongkrak" kelulusan siswa itu tidak dihapuskan, kata dia, maka terjadi pembodohan nasional. Wapres yakin, jika tidak ada lagi keinginan berbuat curang dengan budaya sontek-menyontek dan pelaksanaan ujian pun dilakukan dengan tertib, maka tidak akan ada lagi kenakalan remaja.

Posisi Strategis USBN

USBN yang diselenggarakan dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah mulai tahun ini memiliki posisi strategis dalam menentukan kelulusan peserta didik di sekolah. Kepala BSNP, Bambang Suryadi mengatakan, esensi USBN adalah penilaian oleh satuan pendidikan kepada peserta didik. Penggunaan istilah 'berstandar nasional' karena soal USBN disusun berdasarkan kisi-kisi yang berlaku secara nasional dan terdapat soal *anchor* (jangkar) sebanyak 20 sampai 25 persen yang disiapkan oleh

Pusat. "Dengan adanya standar ini, kita bisa mengukur sejauh mana pencapaian standar kompetensi lulusan pada masing-masing jenjang pendidikan," ungkap Bambang.

Di sisi lain, Mendikbud menjelaskan, melalui USBN diharapkan terjadi peningkatan kompetensi guru dalam melakukan penilaian pendidikan. Itu karena penyusunan soal USBN melibatkan guru yang kemudian dikonsolidasikan dengan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Sementara bagi siswa diharapkan dapat diukur capaian kompetensi setelah menyelesaikan program pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu.

"Melalui USBN ini, kita ingin merevitalisasi peran guru dalam melakukan penilaian. Jika selama ini guru cenderung menilai apa yang sudah diajarkan, maka melalui USBN kita ingin guru menilai apa yang mesti dikuasai siswa pada jenjang pendidikan tertentu", katanya.

Terkait dengan bentuk soal, Muhadjir mengatakan ada soal pilihan ganda dan esai dengan komposisi masing-masing 90 dan 10 persen. "Tahun ini seluruh mata pelajaran akan diujikan dalam USBN untuk jenjang SMP, SMA, SMK, Pendidikan Luar Biasa, dan Pendidikan Kesetaraan," ucap mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang tersebut.

Sementara itu, Totok Supriyatno Kepala Balitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam penjelasannya mengatakan pada jenjang Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah, tahun ini tetap tiga mata pelajaran yang akan diujikan, yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam. Ketiga mata pelajaran tersebut merupakan mata pelajaran yang sebelumnya diujikan dalam Ujian Sekolah/ Madrasah (US/M). "Sedangkan untuk mata pelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Ilmu Pengetahuan Sosial, Seni Budaya dan Keterampilan, serta Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Olahraga, naskah soal ujian 100 persen disiapkan oleh satuan pendidikan," ungkapnya. **(RAN)**

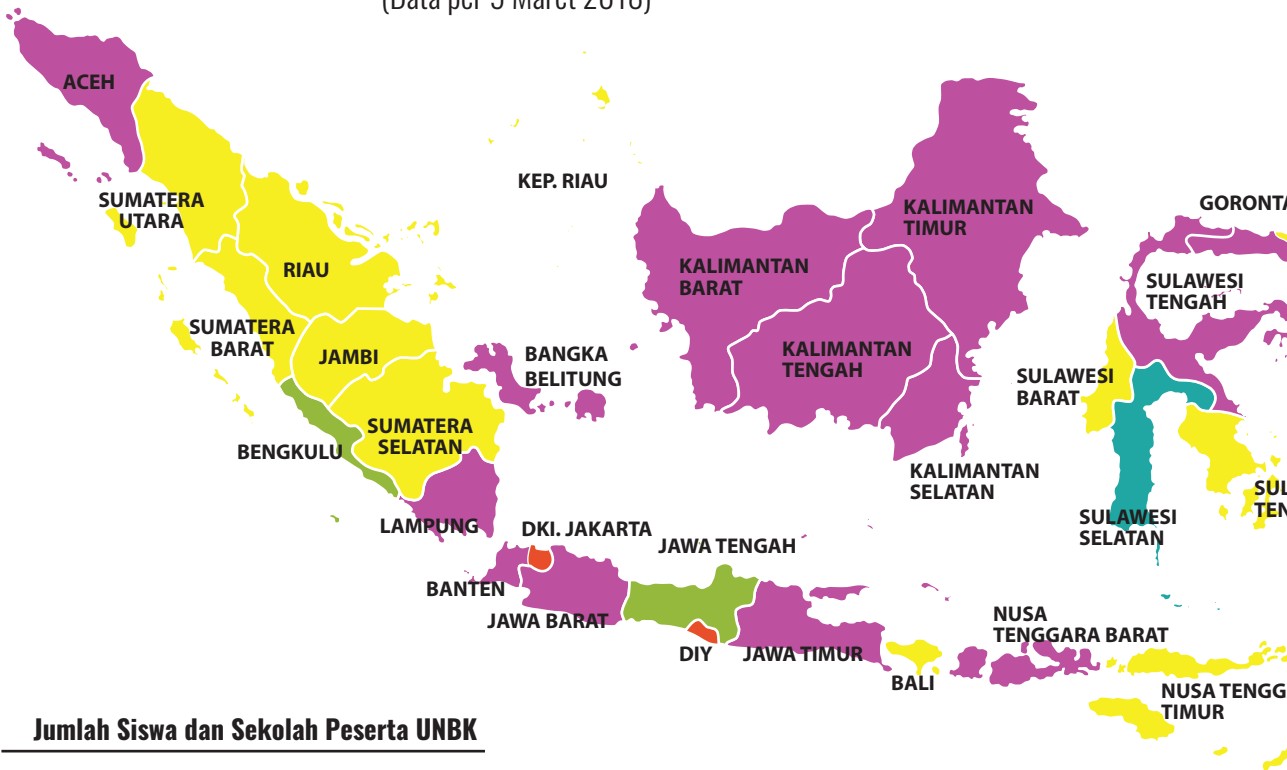


Menuju 100% Ujian Nasional Berbasis Komputer

Tahun ini merupakan keempat kalinya pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) sejak 2015 lalu. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus berupaya mendorong seluruh ekosistem pendidikan dan kebudayaan dalam penyelenggaraan UNBK 100 persen pada jenjang Sekolah Menengah atau sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat di seluruh wilayah Indonesia. Penyelenggaraan ujian nasional (UN) 2018 dengan moda UNBK tahun ini mencapai 6,29 juta peserta dari total 8,1 juta peserta UN.

PROVINSI PENYELENGGARA UNBK 100%

(Data per 9 Maret 2018)



Jumlah Siswa dan Sekolah Peserta UNBK

	SMA	SMK	SMP
	1.395.666	1.459.062	2.005.390
	11.353	12.495	18.202

*data SMP tidak termasuk MTs

“**SEBANYAK 78** persen peserta didik siap mengikuti UNBK. Jumlah peserta ini meningkat signifikan dari penyelenggaraan tahun lalu,” ujar Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud, Totok Suprayitno, pada acara Taklimat Media tentang Rencana Pelaksanaan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional 2018 di Jakarta, Selasa (13/3/2018).

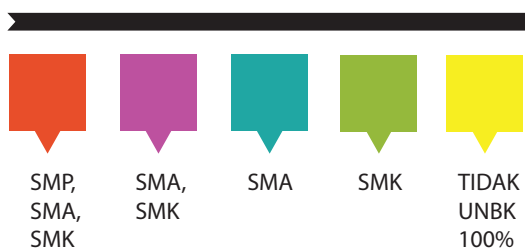
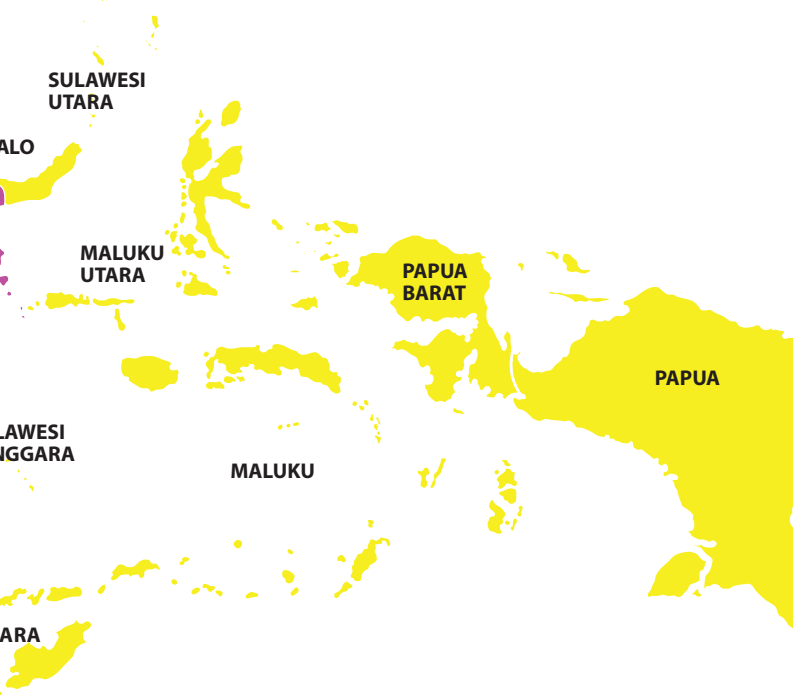
Peningkatan peserta UNBK tahun ini mencapai 166 persen dari tahun sebelumnya, yang mencapai 3,7 juta peserta. Pada 2018, tercatat 17 dari 34 provinsi di Indonesia menyelenggarakan UNBK 100 persen untuk jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan 16 provinsi untuk jenjang Sekolah

Menengah Atas (SMA) sedangkan jenjang SMP hanya dua provinsi saja. Saat ini hanya ada dua provinsi yang menyelenggarakan UNBK 100 persen di jenjang SMP, SMA, dan SMK yaitu Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemendikbud mengapresiasi peran serta pemerintah daerah dan pemangku kepentingan bidang pendidikan dan kebudayaan dalam penyelenggaraan UN tahun ini.

UNBK adalah moda UN menggunakan komputer yang dilengkapi perangkat lunak khusus dalam menampilkan soal dan proses menjawabnya serta tingkat kesulitannya sama dengan soal UNKP. Penyelenggaraan UNBK saat ini masih menggunakan sistem semi-daring (dalam jaringan) yaitu soal UN dikirim dari server pusat secara daring melalui jaringan (sinkronisasi) ke server sekolah, kemudian saat ujian siswa dilayani oleh server sekolah secara luar jaringan (luring) dan selanjutnya hasil UN dikirim kembali dari server sekolah ke server pusat secara daring. Sekolah yang memiliki minimal satu server dan perangkat komputer lebih dari 20 unit dapat ditetapkan menjadi tempat pelaksanaan UNBK.

Pada 2018 ini, Balitbang Kemendikbud telah mengembangkan perangkat lunak UNBK yang sangat ramah pengguna atau dapat digunakan oleh peserta didik yang kemampuan literasi digitalnya masih rendah. Bahkan, aplikasi itu dapat menunjang pelaksanaan UNBK secara luring dengan catatan sekolah penyelenggara dapat memenuhi syarat-syarat teknisnya.

Penyelenggaraan UNBK telah terbukti mampu meningkatkan mutu, integritas, reliabilitas, serta efisiensi waktu dan biaya dibandingkan pelaksanaan ujian nasional berbasis kertas dan pensil (UNKP) yang penyelenggaraannya masih konvensional. Hal itu dibuktikan dengan penambahan sekolah sebagai penyelenggara UNBK yang signifikan dan bertahap dari tahun ke tahun. Pada 2015 jumlah sekolah penyelenggara UNBK sebanyak 556 sekolah dan meningkat pesat pada 2016 dan 2017





dengan jumlah masing-masing 4.382 sekolah dan 30.557 sekolah.

Berbagi Sumber Daya

Peningkatan jumlah sekolah penyelenggara UNBK itu seiring dengan kebijakan Kemendikbud yang memperbolehkan sekolah melaksanakan UNBK secara *resource sharing* (berbagi sumber daya). Sekolah yang sarana komputernya masih terbatas dapat melaksanakan UNBK di sekolah lain yang sarana komputernya sudah memadai sesuai kesepakatan bersama serta keduanya berada dalam radius maksimal lima kilometer. Tak hanya itu, Kemendikbud bersama Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) merancang dan menentukan jadwal penyelenggaraan UN yang mendukung terselenggaranya UNBK dengan metode berbagi sumber daya tersebut.

Skema *resource sharing* juga mendorong pemerintah daerah setempat untuk mengimbuai sekolah-sekolah di daerahnya bersama pemangku kepentingan bidang pendidikan lainnya agar bergotong royong dalam pelaksanaan UNBK. Namun sekolah juga tidak perlu memaksakan dalam penyelenggaraan UNBK jika memang belum siap dari berbagai aspek misalnya ketersediaan listrik dan lain-lain. Kesuksesan penyelenggaraan UNBK akan berjalan baik jika adanya dukungan dari seluruh ekosistem pendidikan dan kebudayaan.

Komite sekolah dan orang tua pun memiliki peran penting dalam penyelenggaraan UNBK ini. Misalnya, komite sekolah mengoordinir orang tua siswa peserta UN untuk meminjamkan perangkat komputer atau laptop kepada sekolah penyelenggara UNBK tetapi komite sekolah tidak boleh mengadakan pungutan untuk pengadaan komputer tersebut. Selain itu komite sekolah dan orangtua juga dapat bekerja sama dengan sekolah untuk mengadakan

Ujian Nasional 2018 jenjang SMP dan SMA atau yang sederajat diikuti oleh 8,1 juta peserta dari 96 ribu satuan pendidikan di seluruh Indonesia

kegiatan pelatihan mengerjakan soal dengan perangkat komputer agar siswa terbiasa.

Dari segi efisiensi waktu dan biaya, UN dengan moda UNBK juga mampu meminimalisir keterlambatan penggandaan dan distribusi naskah soal pada moda UNKP. Sebelum adanya UNBK, Kemendikbud mengeluarkan anggaran sekitar Rp135 miliar untuk pelaksanaan UN dengan moda UNKP di seluruh Indonesia. Namun, setelah adanya moda UNBK terjadi penurunan drastis alokasi anggaran penyelenggaraan UN dengan moda UNKP di tahun ini menjadi sebesar Rp35 miliar atau turun sekitar 74 persen.

Kepala BSNP, Bambang Suryadi mengungkapkan, UNBK pun terbukti efektif meningkatkan indeks integritas dalam pelaksanaan UN. Tahun lalu, tercatat sebanyak 71 persen sekolah mampu meraih Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) yang tinggi, hal ini meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 21 persen.

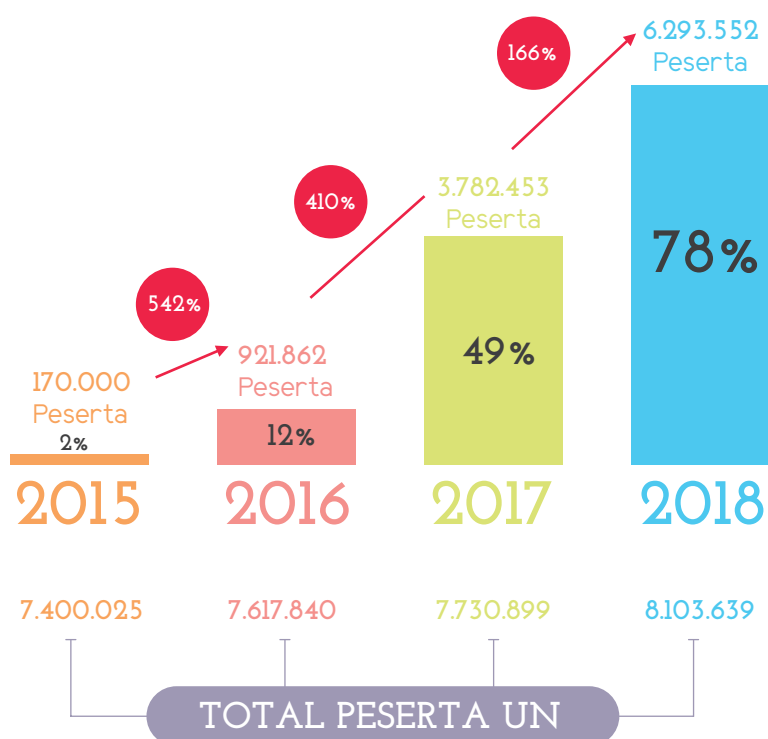
Selain itu, UN juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan perbaikan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Meskipun UNBK mampu meningkatkan IIUN secara signifikan tetapi masih terdapat penurunan atas prestasi peserta UN. "Tantangan kita berikutnya adalah meningkatkan prestasi dan capaian dalam UN. Untuk itu perlu ada perbaikan dan peningkatan proses pembelajaran," tutur Bambang.

Dari sisi teknis penyelenggaraan UNBK, Kemendikbud juga telah berkoordinasi dengan PT Perusahaan Listrik Negara

dan penyedia-penyedia jasa internet untuk memberikan dukungan di semua daerah di Indonesia agar meminimalisasi kendala teknis seperti listrik padam, gangguan jaringan internet, dan lainnya. Jika kendala-kendala itu benar-benar terjadi saat pelaksanaan UNBK maka peserta UNBK tidak perlu khawatir karena jawaban yang telah diisi tetap tersimpan dengan baik dan sisa waktu ujian pun tidak berkurang saat mereka melanjutkannya kembali.

Jadi, tunggu apa lagi untuk menyelenggarakan UNBK? **(ABG)**

PESERTA UN BERBASIS KOMPUTER



Isian Singkat Warnai Ujian Nasional 2018

Ada yang berbeda dengan bentuk soal dalam ujian nasional (UN) 2018 kali ini. Di tahun-tahun sebelumnya bentuk soal UN hanya berupa pilihan ganda saja tetapi di tahun ini terdapat soal isian singkat. Bentuk soal baru dalam UN itu dimaksudkan untuk mengukur seberapa besar kemampuan siswa berpikir tingkat tinggi.



ANAK-ANAK DI era saat ini perlu memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi atau yang lebih dikenal dengan *high order thinking skill* agar mampu bersaing di dunia global. Melalui isian singkat dalam UN, para siswa diajak untuk terbiasa berpikir lebih keras dalam mencari jawaban, tidak sekadar memilih atau menebak jawaban seperti bentuk soal pilihan ganda yang sudah tersedia jawabannya.

Tahun ini, isian singkat UN hanya ada pada soal mata pelajaran matematika saja dan khusus diberikan bagi siswa jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sederajat dan Sekolah Menengah

Kejuruan (SMK)/Sederajat. Jumlah soal isian singkat dalam UN pun hanya sebesar 10 persen atau sebanyak tiga sampai empat butir soal dari total soal UN.

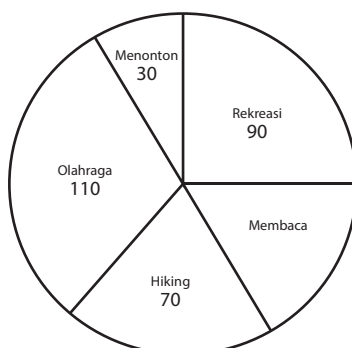
Tingkat kesulitan dalam soal isian singkat UN tidak berbeda dengan soal pilihan ganda sehingga siswa tak perlu khawatir untuk menjawabnya. Hanya cara menjawabnya saja yang membedakan bentuk soal isian singkat dan pilihan ganda pada UN. Jika soal pilihan ganda dijawab dengan memilih jawaban yang sudah ada, maka soal isian singkat dijawab dengan mengisi kolom yang telah disediakan.

Contoh Pengisian Jawaban Isian Singkat UN



PENGISIAN JAWABAN SOAL ISIAN SINGKAT MATEMATIKA SMA/MA/SMK/PAKET C DI LJUN

37. Diagram lingkaran berikut menunjukkan hobi dari siswa kelas XI IPS 2 SMA.



Diketahui 70 siswa hobi menonton. Jumlah siswa yang memiliki hobi membaca ada ... orang

JAWABAN SOAL ISIAN

Tuliskan jawaban Anda pada kotak isian LJUN dimulai dari kotak pertama sebelah kiri, lalu hitamkan bulatan di bawahnya sesuai dengan angka di atasnya.

37									
1	2	0							
0	0	●	0	0	0	0	0	0	0
●	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	●	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

Dalam pengisiannya, jawaban isian singkat UN dengan moda komputer dapat langsung diketik pada kolom jawaban yang tersedia di komputer. Apabila UN dilaksanakan dengan moda kertas dan pensil maka jawaban ditulis dan dihitamkan angka jawabannya pada kolom jawaban isian singkat di lembar jawaban UN yang selanjutnya jawaban akan dipindai dengan menggunakan pemindai atau *scanner*.

Tak hanya isian singkat dalam UN saja untuk mengukur kemampuan siswa berpikir tingkat tinggi, uraian dalam ujian sekolah berstandar nasional (USBN) pun mengukur hal yang sama. USBN dilaksanakan oleh seluruh sekolah di semua jenjang pendidikan mulai dari Sekolah Dasar (SD)/sederajat, Sekolah Menengah Pertama (SMP)/sederajat, dan SMA/Sederajat serta SMK/Sederajat.

Tak hanya isian singkat dalam UN saja untuk mengukur kemampuan siswa berpikir tingkat tinggi, uraian dalam ujian sekolah berstandar nasional (USBN) pun mengukur hal yang sama.

Seluruh mata pelajaran diujikan bagi siswa dalam USBN kecuali siswa SD/ sederajat. Mata pelajaran yang diujikan pada USBN adalah mata pelajaran yang diajarkan dalam pembelajaran di sekolah, sesuai dengan kurikulum yang berlaku di sekolah tersebut.

Bagi siswa SD/sederajat, USBN memang menjadi hal yang baru karena tahun ini kali pertama diterapkannya USBN. Namun, jumlah mata pelajaran yang diujikan hanya tiga mata pelajaran, yaitu Matematika, Bahasa Indonesia, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).

Bentuk soal uraian singkat pada USBN yang diberikan pun sama untuk semua jenjang pendidikan, yaitu sebanyak lima butir soal di setiap mata pelajaran yang diujikan. Cara pengisian bentuk soal uraian singkat juga langsung ditulis pada lembar jawaban USBN, dengan alokasi waktu pengerjaan selama 120 menit di setiap mata pelajaran yang

diujikan. Akan tetapi, USBN untuk siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusi (tunanetra, tunarungu, tunadaksa, dan tunalaras) waktu pelaksanaan USBN dapat ditambah maksimal selama 45 menit setiap mata pelajaran yang diujikan.

Dalam pemeriksaan USBN, bentuk soal uraian singkat akan diperiksa oleh dua orang guru sesuai mata pelajarannya dengan mengacu pada pedoman penskoran USBN yang berlaku. Jika terdapat selisih lebih dari 25 persen dari skor maksimum antara kedua pemeriksa itu, maka pemimpin satuan pendidikan dapat menugaskan pemeriksa ketiga, sehingga nilai akhir dari soal uraian singkat adalah rata-rata dari semua pemeriksa. Sekolah dapat menentukan pembobotan nilai USBN antara bobot nilai pilihan ganda dan bobot uraian singkat namun tetap dengan perbandingan yang proporsional. **(PRM/ABG)**



Pertama Kali USBN di Jenjang Sekolah Dasar

Mulai 2018, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menetapkan kebijakan baru untuk ujian akhir di jenjang sekolah dasar (SD), yakni dengan menerapkan ujian sekolah berstandar nasional (USBN) bagi peserta didik kelas 6. USBN di tingkat SD hanya menguji tiga mata pelajaran, yakni Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).



SEBELUMNYA, PADA 2017 ada dua jenis ujian di jenjang SD dan Madrasah Ibtidaiyah (MI), yaitu Ujian Sekolah/Madrasah (US/M) dan Ujian Sekolah. Kemudian tahun ini berubah menjadi USBN dan Ujian Sekolah. Jika USBN hanya menguji tiga mata pelajaran, maka US menguji lima mata pelajaran, yakni Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN), Ilmu

Pengetahuan Sosial (IPS), Seni Budaya dan Keterampilan, dan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Olahraga.

Dengan perubahan format ujian dari US/M menjadi USBN, maka berubah pula pola pembuatan naskah soal ujian. Sebelumnya, pada US/M, sebanyak 25 persen soal disiapkan oleh Pusat sebagai soal *anchor* (jangkar), dan 75 persen soal disiapkan oleh guru

yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Sekarang, pada USBN 2018, sebesar 20 sampai 25 persen soal disiapkan oleh Pusat sebagai soal jangkar, dan 75 sampai 80 persen disiapkan oleh guru yang tergabung dalam Kelompok Kerja Guru (KKG). Kemudian untuk ujian sekolah (US), seluruh soal disiapkan sekolah berdasarkan kisi-kisi nasional yang ditetapkan oleh Pusat, yaitu Kemendikbud bersama Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Soal USBN SD juga akan menyertakan soal berbentuk uraian sebanyak 10 persen dari total soal. Hal ini berbeda dengan US/M yang berlaku pada tahun sebelumnya, di mana semua soal berbentuk pilihan ganda. Khusus lima mata pelajaran pada US, soal-soal akan dibuat oleh guru masing-masing sekolah. Meskipun begitu, Kemendikbud akan mendorong guru-guru untuk membuat soal US dengan kombinasi antara pilihan ganda dan uraian. Soal berbentuk uraian

dinilai sebagai salah satu metode tepat untuk memenuhi kompetensi generasi abad 21 yang memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi atau dikenal sebagai *high order thinking skill* (HOTS).

Secara teknis, pelaksanaan USBN untuk SD/MI sudah bisa menerapkan ujian berbasis komputer, khusus soal yang berbentuk pilihan ganda saja. Kemudian soal uraiannya akan dikerjakan siswa pada kertas jawaban uraian USBN atau secara manual.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy mengatakan, salah satu fungsi USBN adalah meningkatkan peran dan kualitas guru, terutama dalam melakukan evaluasi belajar bagi peserta didiknya, termasuk guru SD yang diterapkan melalui USBN tahun ini. Guru yang tergabung dalam Kelompok Kerja Guru (KKG) atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) memegang peran yang besar dalam proses pembuatan soal USBN.

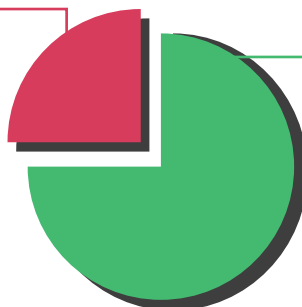
USBN 2018

MATA PELAJARAN



PENYUSUNAN SOAL

20-25%
Pemerintah Pusat



75-80%

- SMA/SMK : Guru/MGMP
- SMP : Guru/MGMP
- SD : Guru/KKG
- Pend. Kesetaraan : Forum Tutor

Pembuatan soal USBN oleh guru bertujuan untuk merevitalisasi peran guru terutama di dalam menguasai salah satu tugas pokoknya, yaitu penilaian. Selama ini, kebanyakan soal US ditetapkan oleh provinsi atau dari institusi tertentu, bahkan mengambil dari bimbingan belajar atau dari Lembar Kerja Siswa. Soal-soal tersebut tidak dibuat oleh guru yang bersangkutan.

Hal itu tidak sesuai dengan tugas pokok guru yang harus bertanggung jawab dalam mengevaluasi atau melakukan penilaian terhadap peserta didiknya. Melalui pelaksanaan USBN, diharapkan peran guru yang selama ini hilang tersebut, bisa kembali.

Kemendikbud telah menyelenggarakan pelatihan-pelatihan membuat soal untuk mendukung guru-guru dalam meningkatkan peran dan kualitasnya. Dengan begitu, ada upaya pembinaan dan pendampingan dari pemerintah pusat bagi guru-guru dalam membuat soal, sehingga diharapkan pelatihan tersebut mampu meningkatkan

kompetensi mereka dalam membuat soal-soal yang lebih berkualitas.

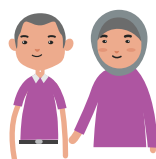
Setelah mengikuti pelatihan itu, diharapkan guru-guru juga dapat lebih teratur dalam membuat perencanaan mengajar dalam proses belajar, hingga mampu membuat soal sendiri dan tidak lagi mengambil soal dari pihak lain. Kemendikbud melakukan seleksi untuk menentukan guru-guru yang membuat soal USBN, sehingga ada proses penyaringan juga di KKG atau MGMP bagi guru yang akan membuat soal tersebut.

Salah satu yang menjadi pertimbangannya adalah bahwa guru juga harus memahami tentang standar kompetensi lulusan yang diharapkan dan mampu membuat soal sesuai dengan standar itu. Dengan begitu, soal yang keluar bukan hanya berasal dari materi yang sudah diajarkan oleh guru saja, melainkan kompetensi apa yang seharusnya dimiliki oleh siswa setelah lulus sekolah. **(DES)**



SD
sederajat

- BHS. INDONESIA
- MATEMATIKA
- IPA



PENDIDIKAN
KESETARAAN

PAKET C & PAKET B

SEMUA
MATA PELAJARAN

PAKET A

- Pkn
- BHS. INDONESIA
- MATEMATIKA
- IPA
- IPS

KOMPOSISI SOAL

90% PILIHAN
GANDA



10% URAIAN



MODA UJIAN



KERTAS



**KERTAS
&
KOMPUTER**

JADWAL UN

SMA/MA sederajat & SMK

TANGGAL-TANGGAL PENTING!

29,31 MARET 2018

Sinkronisasi UN SMK

6-7 APRIL 2018

Sinkronisasi UN SMA/MA sederajat

16 APRIL 2018

Sinkronisasi UN susulan

28 APRIL 2018

Penyerahan Hasil ke Provinsi

2 MEI 2018

Pengumuman Hasil UN di Satuan Pendidikan

UN SMK

UN SMA/MA

UN SUSULAN SMK/SMA/MA



SMP/MTs

TANGGAL-TANGGAL PENTING!

20-21 APRIL 2018

Sinkronisasi UN SMP/MTs

7 MEI 2018

Sinkronisasi UN susulan

18 MEI 2018

Penyerahan Hasil ke Provinsi

23 MEI 2018

Pengumuman Hasil UN SMP/MTs

UN SMP/MTs

UN SUSULAN SMP/MTs



Pendidikan Kesetaraan

TANGGAL-TANGGAL PENTING!

24-25 APRIL 2018

Sinkronisasi Paket C/Ulya

27, 28, 29, 30 APRIL 2018

UN Paket C Pilihan 1

27, 28/29, 30 APRIL & 2 MEI 2018

UN Paket C Pilihan 2

1-2 MEI 2018

Sinkronisasi Paket B/Wustha

4, 5, 6 MEI 2018

UN Paket B Pilihan 1

4, 5/6, 7 MEI 2018

UN Paket B Pilihan 2

28 MEI 2018

Penyerahan Hasil ke Provinsi

31 MEI 2018

Pengumuman Hasil UN di Satuan Pendidikan

UN PAKET C

UN SUSULAN PAKET C & PAKET B

APRIL 2018

SEN	SEL	RAB	KAM	JUM	SAB	MIN
23	24	25	26	27	28	29
30	1	2	3	4	5	6

MEI 2018

SEN	SEL	RAB	KAM	JUM	SAB	MIN
30	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20

UN PAKET B

HARAPAN MENDIKBUD UNTUK UN 2018

- Marilah kita semua **jujur** dalam menjalani proses pendidikan, termasuk dalam menjalankan ujian.
- **Ujian atau evaluasi bagi anak didik adalah bagian dari pendidikan.** Maka hindarkan dan cegah semua upaya yang mengarah pada ketidakjujuran, karena itu jelas akan mengingkari hakekat pendidikan.
- Jadikan hasil-hasil ujian dan evaluasi bagi anak didik sebagai **"cermin"** yang memberi gambaran apa adanya, bukan cermin yang membuat kita hanya terlihat lebih baik dari keadaan sebenarnya.
- Manfaatkan hasil-hasil penilaian untuk melakukan **perbaikan secara berkelanjutan.**

USBN Dorong Otonomi Guru

Pelibatan guru dalam penyusunan soal-soal ujian sekolah berstandar nasional (USBN) dimaknai sebagai bagian dari upaya menegakkan otonomi guru, terutama dalam hal evaluasi proses hasil belajar siswa di sekolah. Pemberdayaan guru itu juga menjadi bagian dari peningkatan profesionalisme guru secara berkelanjutan.

DALAM PENERAPAN Kurikulum 2013, guru dituntut untuk mampu meningkatkan kompetensinya yang mencakup pembuatan soal ujian berjenjang dari yang sederhana hingga tingkat tinggi. Para guru pun butuh penguatan dalam pembuatan soal tingkat tinggi sebagai pencerminan dari materi ajar yang diajarkan kepada siswa di kelas.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy mengatakan, sudah cukup lama guru tidak terbiasa membuat alat evaluasi hasil belajar sendiri. Karena itu, kata dia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menggelar berbagai pelatihan bagi guru-guru untuk menyusun soal-soal ujian sebagai alat evaluasi belajar siswa.

“Kita ingin guru semakin memahami tentang standar isi, standar evaluasi, terutama kompetensi lulusan yang diharapkan. Bukan sekadar apa yang diajarkan guru, tapi apa yang harus dimiliki oleh siswa saat dinyatakan lulus,” ujar Mendikbud beberapa bulan lalu.

Guru harus memahami tentang standar nasional kompetensi lulusan yang diharapkan sehingga dalam membuat soal ujian dapat sesuai dengan standar tersebut. “Jadi bukan apa yang diajarkan oleh guru, tetapi apa yang seharusnya dimiliki oleh siswa itu kalau nanti dia lulus,” ungkap mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu.

Setelah guru-guru mengikuti pelatihan membuat soal, diharapkan mereka dapat lebih teratur dalam membuat perencanaan mengajar hingga

membuat soal ujian sendiri, sehingga tidak ada lagi yang mengambil soal ujian dari pihak lain. Semua pihak pun harus siap dengan segala perubahan pada penyelenggaraan USBN kali ini dan tidak bersikap antiperubahan. “Memang berubah itu bukan jaminan kita akan maju, tapi setidaknya kita sudah berikhtiar untuk maju,” tutur Mendikbud.

USBN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi siswa yang dilakukan sekolah untuk seluruh mata pelajaran dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar, kecuali mata pelajaran muatan lokal (mulok).

USBN sebenarnya bersinggungan juga dengan kalibrasi guru atau peningkatan kemampuan guru yang mengacu pada standar pendidikan nasional. Tiga hal yang menjadi dasar guru melakukan kalibrasi, yaitu konten, proses, dan evaluasi. Jika guru dilatih secara intensif membuat soal berstandar nasional, maka guru pun seharusnya bisa menghasilkan soal sekaliber nasional.

Pelibatan guru dalam pembuatan soal USBN kali ini dilakukan melalui komunitas guru di setiap daerah yang tergabung dalam Kelompok Kerja Guru (KKG) dan atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Dalam pembuatannya, guru harus tetap mengacu pada standar dan kisi-kisi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan tetap dikoordinasikan dengan pemerintah daerah setempat. Sebanyak 20-25 persen soal dalam USBN 2018 akan dibuat oleh Pusat sebagai soal jangkar (*anchor*), sedangkan 75-80 persen soal akan dibuat oleh guru

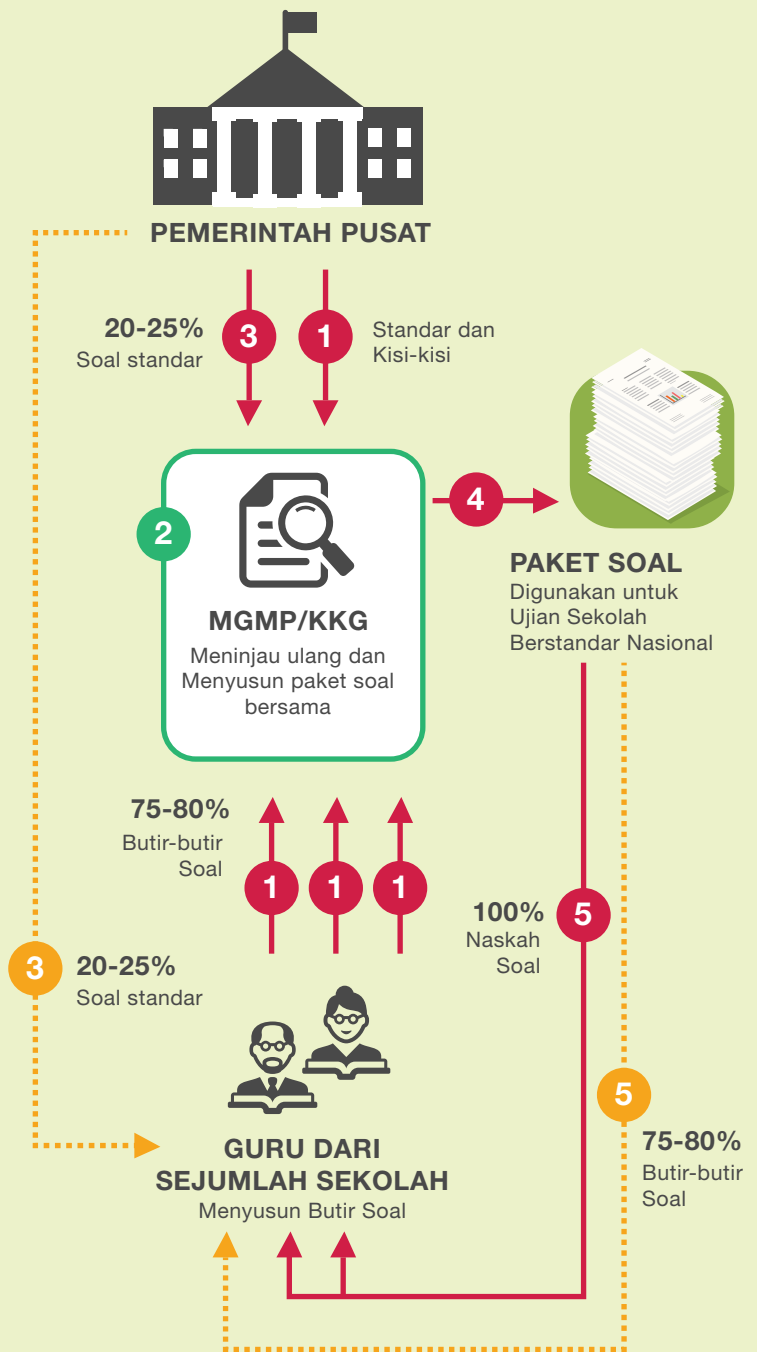
yang dikonsolidasikan melalui KKG atau MGMP tersebut.

KKG adalah wadah kerja sama guru-guru dalam satu gugus, dalam upaya meningkatkan kemampuan profesional mereka yang fungsi utamanya adalah menampung dan memecahkan masalah yang dihadapi dalam kegiatan belajar mengajar melalui pertemuan diskusi, pengajaran contoh, demonstrasi penggunaan, dan pembuatan alat peraga. MGMP sama halnya dengan KKG, merupakan suatu organisasi guru yang dibentuk untuk menjadi forum komunikasi yang bertujuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi guru dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari di lapangan. KKG berada di tingkat Sekolah Dasar sedangkan MGMP berada di tingkat sekolah lanjutan, baik Sekolah Menengah Pertama maupun Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud, Totok Suprayitno mengungkapkan, keterlibatan guru dalam membuat soal USBN juga bisa menjadi acuan atau tolok ukur sekolah dan pemerintah daerah dalam melakukan pemetaan terhadap kemampuan guru itu sendiri. "Esai yang membuat juga (guru,-) sekolah. Jadi yang tahu seberapa bobotnya hanya sekolah, jadi diserahkan ke sekolah. Dalam membuat soal juga harus mempertimbangkan bobot, itu dilakukan di MGMP," jelasnya.

Semangat dari pelibatan guru dalam pembuatan soal USBN kali ini adalah penilaian untuk pembelajaran (*assemnet for learning*) bukan sekadar penilaian untuk pengajaran (*asseement for teaching*) sehingga menjadi hal yang esensial. Ada kecenderungan sekolah yang tidak hanya mengukur materi apa saja yang sudah diajarkan guru kepada siswa, namun juga melalui USBN semestinya dapat mengukur materi apa saja yang dikuasai siswa untuk menamatkan jenjang pendidikannya. (DLA/ABG)

Keterlibatan Guru dalam Penyusunan Soal Ujian Sekolah Berstandar Nasional



..... Guru bisa dapatkan soal langsung dari pemerintah pusat.

— Guru membawa soal ke MGMP lalu diolah dan dikembalikan untuk diujikan.

MGMP : Musyawarah Guru Mata Pelajaran

KKG : Kelompok Kerja Guru

Saat Anak Hadapi Ujian, Orangtua Jangan Lakukan Hal-hal Ini

Dalam menghadapi Ujian Nasional (UN) dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), bisa jadi ini masa yang menegangkan bagi siswa. Berbagai persiapan pun akan dilakukan siswa, seperti menambah jam belajar di sekolah untuk pendalaman materi, bahkan hingga mengikuti les di luar sekolah dengan harapan mereka akan lebih siap menghadapi kedua ujian itu. Di sini, orangtua mempunyai peranan yang sangat penting untuk meredakan ketegangan anak-anaknya, bukan terus membombardir mereka dengan berbagai tindakan agar bisa mendapatkan nilai ujian yang bagus.

TERKADANG ORANG tua dan keluarga di rumah juga sering tidak sadar dan menunjukkan sikap risau agar sang anak mau giat belajar sendiri di rumah. Padahal, seusia sekolah anak-anak masih dalam kondisi yang lelah, namun orangtua tetap menanyakan bagaimana persiapan mereka menghadapi ujian itu. Bahkan, terkadang orangtua memberi ancaman kepada mereka agar bisa mendapatkan

hasil yang memuaskan yang sebenarnya seringkali kepuasan itu bagi orangtua bukan anaknya.

Belum lagi berbagai pemberitaan di media massa tentang UN dan USBN yang seringkali menyajikan hal-hal yang mendukung ketegangan siswa dalam menghadapi kedua ujian itu. Orangtua perlu mendampingi anak-anaknya dalam menerima pemberitaan tersebut,

Peran Guru Bagi Siswa Peserta UN dan USBN

SEKOLAH adalah rumah kedua bagi siswa. Mereka bisa menghabiskan hampir separuh waktu dalam sehari di sekolah bersama teman-teman dan gurunya. Guru sebagai sosok yang dihormati dan disegani dapat melakukan beberapa hal untuk mendukung siswa-siswinya menghadapi UN dan USBN, diantaranya:

Memberikan Bimbingan

Rasa tertekan dan acuh tak acuh dapat dilihat pada siswa yang akan menghadapi ujian. **Guru harus mau membuka diri dan terlibat aktif menanyakan masalah-masalah yang mereka hadapi serta mendengarkan dan memberikan solusinya** sehingga mereka beban yang dirasakan oleh siswa pun bisa berkurang. Setelah itu guru mulai mengarahkan hal-hal yang sebaiknya mereka lakukan untuk menghadapi ujian.

Memberikan Motivasi

Ditengah hiruk pikuk persiapan menjelang UN dan USBN, para guru bisa menjadi motivator bag para siswa. **Tak jarang siswa lebih mendengarkan kata guru daripada orangtuanya.** Jadikan hal ini sebagai momen yang tepat untuk memberi ketenangan dan semangat pada siswa untuk terus belajar dan meraih impiannya.

terlebih lagi siswa yang kemampuan literasinya masih rendah.

Jadi, kita dapat membayangkan bagaimana kondisi emosional para siswa yang mendapat pengaruh dari berbagai pihak dalam menghadapi UN dan USBN. Dalam hal ini, perang penting orangtua sebagai pendamping paling dekat sangat diperlukan untuk membuat rasa nyaman pada siswa sehingga mereka siap dan percaya diri melaksanakan ujian.

Emosi anak dapat ditentukan juga oleh sikap orang tuanya sendiri, maka ajarkan anak untuk tetap tenang dalam menghadapi masa ujian itu. Orangtua harus memberikan penghargaan atas usaha yang dilakukan anaknya dalam menghadapi ujian bukan hasil ujiannya saja. Orangtua pun perlu mengajak anaknya untuk senantiasa berdoa serta mengingatkan bahwa bagaimanapun hasil ujian itu, orangtua tetap akan menyayangi dan mengasahi mereka.

Rumah idealnya menjadi tempat bagi siswa setelah pulang sekolah dan orangtua menjadi tempat perlindungan bagi anak ketika mereka merasa lelah,

tertekan, dan lainnya. Orangtua adalah pihak yang paling mengerti kelemahan dan kelebihan anaknya sendiri sehingga orangtua pun perlu mengetahui materi apa yang dirasa sulit oleh anaknya dalam menghadapi ujian.

Jika orangtua mampu mengatasi kesulitan itu maka orangtua dapat membuat perencanaan dan target belajar bagi anak dalam menghadapi ujian. Namun, jika orangtua tidak dapat mengatasinya maka alangkah lebih baik hal itu dikomunikasikan dengan guru di sekolah dan berkolaborasi dalam memberikan pendampingan kepada anak saat menghadapi ujian.

Orangtua juga dapat berbagi pengalaman dengan guru dalam mendampingi mereka dalam proses belajar. Orangtua perlu menceritakan beberapa hal kepada guru seperti kondisi anak di rumah, ketertarikan belajarnya, kekurangan dan kelebihannya serta lainnya. Hal ini dilakukan agar guru dapat menyesuaikan pola belajar siswa dan dapat memberikan motivasi serta arahan ketika berada di sekolah.

(RUN/ABG)

Memberikan Pengajaran

Guru harus sabar mengajarkan materi yang akan diujikan sesuai kisi-kisinya. **Pendalaman materi juga perlu dilakukan agar siswa lebih percaya diri menghadapi ujian** tetapi guru harus memahami kelemahan masing-masing siswa dalam mata pelajaran tertentu terlebih dahulu. Selanjutnya, guru dapat memberikan pengajaran serta latihan bagi siswa agar mereka lebih paham materi yang menjadi kelemahannya.

Memberikan Didikan

Peran guru sebagai pendidik sangat penting dalam hal menghadapi ujian. **Guru harus memberikan pengertian betapa pentingnya kedisiplinan dan kejujuran dalam pelaksanaan ujian.** Anak-anak dididik agar mental mereka tidak mudah stres dalam menghadapi ujian.



*PRESTASI
PENTING,
JUJUR
YANG UTAMA*





Penguatan Pendidikan Karakter dalam Ciptakan Branding Sekolah

KARAKTER YANG baik mampu membuka pintu kesuksesan, demikian juga dengan sekolah berkarakter dapat membuka kesuksesan bagi siswanya. Wujud penguatan karakter di sekolah dapat diimplementasikan melalui berbagai kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, maupun budaya sekolah.

Buku yang berjudul “Cara Jitu Menciptakan Branding Sekolah Berbasis Karakter” mengupas tentang bagaimana pengelolaan sekolah berbasis karakter. Pengelolaan sekolah yang baik dapat menjadikan sekolah itu menjadi sekolah berkarakter, sehingga memiliki kekhasan tersendiri dari penggalan potensi sekolah dan menjadi pilihan utama orang tua untuk menitipkan pendidikan anak-anaknya. Kekhasan sekolah yang tercipta akan menjadi *branding* dari sekolah itu sendiri.

Buku ini terdiri dari tiga bagian isi, yaitu manajemen sekolah berkarakter, studi kasus sekolah berkarakter, dan gerakan penguatan pendidikan karakter. *Branding* yang dibuat dengan cara mengembangkan dari kelima nilai karakter utama seperti religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Kelima nilai tersebut tercermin dalam kegiatan-kegiatan sekolah.

Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) ini menjadi momentum bagi perbaikan sekolah untuk menyesuaikan dengan kondisi dan budaya sekolah. Buku ini merupakan perpaduan dari refleksi diri, studi kasus, serta studi literasi guna mendukung pemerintah dalam rangka menyukseskan gerakan PPK.

Buku ini sangat cocok dibaca oleh pelaku pendidikan di sekolah agar dapat menciptakan metode pendidikan yang bisa membentuk karakter baik siswa maupun civitas akademika lainnya. Buku dengan penggunaan bahasa yang lugas dan ilustrasi dalam memberikan penjelasan materi membuat buku ini menarik serta mudah dipahami pembacanya.

Jika ingin mengetahui informasi selengkapnya dari koleksi ini, *scan QR code* berikut. Selain itu, Anda juga dapat datang langsung ke Perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang berada di Gedung A lantai 1 dan lantai Mezanin Kompleks Kemendikbud, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270.

(RWT)



KATALOG INDUK PERPUSTAKAAN

di Lingkungan Kemendikbud

Ada 35 perpustakaan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang telah bergabung di Katalog Induk Perpustakaan di Lingkungan Kemendikbud. Katalog ini dapat diakses melalui laman dengan alamat <http://perpustakaan.kemdikbud.go.id/ucs/>.



Libatkan Publik, Indonesiana Lestarikan Kearifan Budaya Lokal

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan gotong royong dan pelestarian kearifan lokal menjadi poin penting yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam tata kelola kebudayaan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Kebudayaan mengembangkan platform Indonesiana guna menangani kegiatan-kegiatan budaya secara lebih sistematis.

INDONESIANA MERUPAKAN platform kerja sama kebudayaan yang merangkai berbagai festival kebudayaan di berbagai daerah. Platform ini melibatkan kerja sama dengan pemerintah daerah, instansi terkait, lembaga filantropi, komunitas, dan pemangku kepentingan bidang pendidikan dan kebudayaan lainnya baik tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

Salah satu tujuan Indonesia adalah untuk menghidupkan ekosistem pemajuan kebudayaan yang merata dan berkelanjutan, serta menguatkan identitas budaya di daerah untuk mengimbangi penguatan identitas politik yang memanfaatkan kebudayaan. Pemajuan kebudayaan itu dilakukan mulai dari perlindungan, pengembangan, pemanfaatan hingga pembinaan di bidang kebudayaan.

Melalui Indonesiana, diharapkan peran kebudayaan dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dapat meningkat. Selain itu, kebudayaan juga mampu mewujudkan akses yang meluas, merata, dan berkeadilan di bidang kebudayaan itu sendiri.

Platform Indonesiana ini tidak ada tema utama yang mengikat kepada keseluruhan festival yang akan diselenggarakan, masing-masing festival memiliki tema yang ditentukan ditingkat lokal sesuai dengan khasanah lokalnya.



Hal ini dimaksudkan untuk melestarikan dan memajukan kebudayaan setempat agar lebih dikenal baik di kancah nasional maupun internasional.

Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud, Hilmar Farid mengungkapkan, Indonesiana merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas tata kelola melalui tindakan nyata dan semangatnya bukan hanya melaksanakan kegiatan melalui festival-festival saja. Seringkali, kata dia, sebuah festival yang diselenggarakan sebenarnya bisa mendunia tetapi nyatanya terus berputar di lingkungan sendiri dan senang pada



kegiatan sendiri seperti katak dalam tempurung.

“Harus tumbuh kesadaran bahwa ada dunia yang lebih besar di luar sana. Jadi semangat kita bukan sedang berlomba-lomba membuat festival,” ujar Hilmar.

Dia menambahkan, tata kelola yang dimaksud adalah bagaimana menyinergikan para pemangku kepentingan di bidang pendidikan dan kebudayaan, yakni antar kementerian dan lembaga yang terkait hingga komunitas-komunitas serta masyarakat agar duduk bersama dan saling terkoneksi satu sama lainnya. Hasil

akhirnya ialah membentuk budaya masyarakat yang mandiri.

Rencananya Indonesiana akan ada 20 festival di 20 daerah yang berbeda. Daerah yang akan menjadi tempat penyelenggara harus sesuai dengan tiga kriteria yaitu memiliki pengalaman mengelola festival kebudayaan bertaraf nasional atau internasional, penyelenggaraan festival kebudayaannya belum optimal, dan festival kebudayaannya memiliki potensi untuk ditingkatkan ke taraf internasional.

Pemerintah daerah juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan Indonesiana asalkan mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan budaya dan menjadi tuan rumah setidaknya tiga tahun berturut-turut dengan dukungan sumber daya yang juga memadai. Selain itu, pemerintah daerah juga harus membangun serta menggerakkan ekosistem budaya di daerah, yaitu melibatkan berbagai pemangku kepentingan di daerah untuk melaksanakan kegiatan budaya tersebut.

..... KRITERIA INDONESIANA

Adanya gotong royong pemajuan kebudayaan yang terwujud melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi bersama.

Adanya komitmen Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kegiatan budaya dan menjadi tuan rumahnya setidaknya selama tiga tahun berturut-turut, dengan dukungan sumber daya (dana dan sebagainya) yang memadai.

Adanya komitmen Pemerintah Daerah untuk membangun dan menggerakkan Ekosistem Budaya di daerah, yaitu melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pelaku budaya, komunitas, dan pihak swasta di daerah untuk bergotong royong melaksanakan kegiatan budaya.

Bentuk pelibatan publik oleh pemerintah daerah yaitu berupa perencanaan bersama, penggalangan dana, pengelolaan jaringan kebudayaan, kurasi, dan publikasi serta kehumasan. Penggalangan dana bersama dilakukan dengan perbandingan 1:1 untuk memperbesar skala festival kebudayaan yang tergabung dalam Indonesiana.

Pada Indonesiana, masyarakat juga dapat terlibat langsung dalam menyemarakkan kehidupan budaya dengan ikut tampil sebagai pelaku budaya di ajang bertaraf internasional. Tidak hanya itu, ajang ini memberikan kesempatan bagi masyarakat luas untuk meningkatkan kemampuannya di bidang seni dan budaya.

Kegiatan festival dalam Indonesiana akan berjalan sesuai alur kerjanya, yaitu tahap pertama *matchmaking*, penajaman, hingga penyelenggaraan festival. Tahap pertama, Ditjen Kebudayaan membentuk Sekretariat Indonesiana dan Dewan Kurator Nasional yang bertugas menyusun standar nasional festival Indonesiana. Sekretariat Indonesiana akan membentuk tim survei yang bertugas langsung ke daerah yang akan menjadi tempat penyelenggaraan festival untuk dinilai kelayakannya sesuai standar nasional festival tersebut.

Pada tahap penajaman, Dewan Kurator Nasional memberikan masukan tentang para pelaku seni dan budaya di tingkat nasional dan internasional yang terlibat untuk mengisi acara festival di daerah tersebut. Sebelum penyelenggaraan festival, tim kurator daerah dapat menentukan penyelenggara kegiatan (pihak ketiga atau *event organizer*) lokal guna mengorganisasikan penyelenggaraan festival di daerah. Setelah semua siap, seluruh kalangan masyarakat lokal hingga mancanegara dapat menikmati festival di daerah tersebut. **(RWT)**

Kini anda dapat mengakses
Majalah Jendela melalui:

jendela.kemdikbud.go.id



Dapat diakses
melalui PC, laptop,
smartphone

Kenali Kendala Pelaksanaan Evaluasi Diri Sekolah

Oleh: Hendarman

Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kemendikbud



PELAKSANAAN EVALUASI diri sekolah (EDS) pada kenyataannya masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan, khususnya terkait dengan perencanaan pengembangan sekolah dan manajemen berbasis sekolah. Mustikasari (2011) mengatakan bahwa peran pengawas dalam implementasi EDS di satuan pendidikan dapat dikatakan belum optimal, meskipun tidak terjadi pada semua pengawas sekolah di seluruh Indonesia.

Pada kajian ini, 62 responden yang terdiri dari guru dan kepala sekolah asal Bogor, Sukabumi, Bekasi, dan Depok menilai tim pengawas sekolah mereka belum mampu bekerja secara

efektif. Pengawas sebagai ujung tombak kegiatan belum cukup kuat untuk menggerakkan sekolah melakukan EDS baik secara emosi, kompetensi, dan keberpihakannya.

EDS pada intinya memberikan kesempatan pada sekolah untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya sebagai dasar penyusunan rencana pengembangan lebih lanjut di sekolah tersebut. Di samping itu, dengan EDS, sekolah juga diharapkan mampu mengenal peluang memperbaiki mutu pendidikan, menilai keberhasilan dalam upaya peningkatan mutu, dan melakukan penyesuaian program-program yang ada serta dapat mengetahui tantangan

yang dihadapi dan mendiagnosis jenis kebutuhan yang diperlukan untuk perbaikan.

EDS dimaksudkan sebagai proses pemetaan mutu sekolah oleh pihak sekolah sendiri secara jujur dan transparan, sehingga dapat ditemukan akar permasalahan yang dihadapi. Melalui EDS, sekolah juga dapat merumuskan rekomendasi atau langkah nyata dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP) secara bertahap, sistematis, dan terencana serta memiliki target dan kerangka waktu yang jelas. Langkah proaktif itu sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.

Pada 2013 lalu, pemetaan mutu pendidikan dengan mengikuti pola EDS ini mulai dilaksanakan dengan sasaran semua satuan pendidikan dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Pemetaan ini diharapkan dapat berfungsi ganda sebagai acuan dalam melakukan evaluasi diri di tingkat

sekolah serta sekaligus memetakan mutu pendidikan pada tingkat daerah maupun tingkat pusat.

Namun, kenyataannya sekolah-sekolah cenderung membuat nilai EDS semaksimal mungkin agar penilaian sekolah tidak buruk sehingga budaya mutu menjadi target sampingan yang terkadang terlupakan. Selain itu, terdapat perbedaan persepsi antara guru dan sekolah, guru beranggapan bahwa EDS yang ada digunakan bukan sebagai dasar penyusunan Rencana Penganggaran Sekolah (RPS). Persepsi lainnya, EDS dianggap sebagai beban tambahan baru yang memberatkan tugas sekolah dan Tim Pengembangan Sekolah (TPS).

Sekolah-sekolah beranggapan bahwa instrumen EDS terlalu banyak dan beberapa kali mengalami perubahan format sehingga menimbulkan kejenuhan serta membingungkan dalam pengisiannya. Hal lainnya yaitu pertanyaan yang tercantum dalam instrumen EDS masih menimbulkan penafsiran ganda dan jumlahnya tidak mewakili ruang lingkup EDS sehingga menimbulkan perbedaan interpretasi, kesulitan menjawab, dan banyak



Solusi alternatif menghadapi kendala pelaksanaan EDS

Sekolah hendaknya membuat perencanaan yang matang dalam melakukan sosialisasi sehingga tidak berbenturan dengan kegiatan lain di sekolah

Sekolah hendaknya memasukkan pelaksanaan EDS dalam kalender dinas pendidikan dan dianggarkan sesuai dengan kebutuhan

Sekolah menumbuhkan rasa kepedulian dan tanggung jawab bahwa EDS merupakan kebutuhan semua warga sekolah.

pertanyaan yang tidak diisi karena pertanyaan yang tidak sesuai dengan status siswa dan bahasa yang digunakan dianggap terlalu tinggi.

Dari segi infrastruktur, masih ada sekolah yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas. Beberapa diantaranya yakni lambatnya jaringan internet di sekolah untuk mengunggah data EDS dalam jaringan (daring), terbatasnya kemampuan operator sekolah, struktur basis data yang belum memudahkan untuk diolah, dan lainnya.

Kepala sekolah sebagai ketua Tim Pengembangan Sekolah (TPS) memiliki peran penting untuk memotivasi seluruh anggota TPS agar bekerja secara maksimal. Namun, menurut responden kepala sekolah jarang menghadiri loka karya yang berkaitan dengan kegiatan EDS. Tak hanya itu, yang mengkhawatirkan lagi yaitu pengawas sekolah tidak benar-benar mendampingi TPS di sekolah binaannya untuk mengisi dan menganalisis EDS.

Dari segi administrasi, EDS cenderung dianggap sebagai beban tambahan

sekolah dan hasilnya belum dimanfaatkan secara optimal dalam penyusunan Rencana Kegiatan Sekolah. Tak hanya itu, masih ada sekolah yang takut mengisi data dalam EDS secara jujur karena dianggap sebagai penilaian kinerja dan prestasi sekolah.

Munculnya sejumlah kendala di atas merupakan implikasi dari tiga hal, yaitu pelaksanaan sosialisasi belum berhasil sepenuhnya, komitmen sekolah melaksanakan EDS masih rendah karena masih belum merasakan manfaatnya, dan kerja sama yang lebih erat serta komunikasi yang lebih intensif antara pendamping, pengawas, dan pihak sekolah masih belum terwujud.

Optimalisasi dan kejelasan peran dari berbagai unsur yang duduk dalam TPS juga menjadi isu penting untuk keberhasilan penerapan EDS. Apabila hal ini dapat dilakukan, maka tidak terjadi adanya komite dan wakil orang tua pada sekolah yang hanya sekedar menghadiri kegiatan pengisian instrumen EDS dan tidak terlibat secara proaktif untuk memberikan sumbang-sumbangan pemikiran untuk mengisi dan menganalisis instrumen EDS.

Penunjukan komite dan wakil orang tua harus yang benar-benar mereka yang memiliki komitmen dan kapasitas untuk turut mengembangkan sekolah melalui kegiatan EDS, bukan hanya sekadar tertulis dalam Surat Keputusan Kepala Sekolah saja. Dengan keterlibatan komite dan orang tua akan membuat mereka memahami kondisi sekolah dan kondisi yang harus dicapai oleh sekolah itu sendiri, yang selanjutnya dapat memunculkan komitmen dan tanggung jawab yang lebih tinggi untuk turut serta mengembangkannya.

Dalam mengatasi kendala-kendala dalam penerapan EDS mensyaratkan adanya sinergi, koordinasi dan komitmen antara pemangku kepentingan di tingkat daerah maupun pusat sesuai dengan wewenang masing-masing. Keberadaan kebijakan khusus untuk penerapan EDS dalam bentuk peraturan daerah, baik peraturan bupati atau peraturan walikota, menjadi salah satu alternatif solusi yang efektif.

Peraturan daerah itu menjadi payung hukum untuk memberdayakan dan

mengoptimalkan peran pengawas sekolah dalam penerapan EDS dengan rasio pengawas dan sekolah dampingan yang proporsional. Peraturan itu juga sekaligus menjadi dasar bagi sekolah untuk mengusulkan dalam penganggaran sekolah untuk menjamin pelaksanaan EDS yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Adapun beberapa saran yang dapat segera dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal penerapan EDS, yakni dengan mengembangkan sistem pengawasan yang dapat menjamin bahwa besarnya alokasi anggaran yang berhak diterima sekolah didasarkan atas proses EDS yang obyektif, transparan, dan jujur. Selain itu, dalam menjaga netralitas dan obyektifitas pelaksanaan EDS, pengawas yang mempunyai wilayah kepengawasan pada sekolah-sekolah tertentu ditugasi pada sekolah-sekolah yang bukan dalam wewenang kepengawasannya pada waktu EDS. (ABG)

Kebijakan yang mendukung program EDS setidaknya memuat tentang:



“Wawas” Bukan “Mawas”

ISTILAH “wawas diri” memang tak lazim didengar oleh kita. Wajar saja karena kita cenderung sering menggunakan istilah “mawas diri” baik dalam percakapan sehari-hari maupun bentuk komunikasi lainnya. Padahal, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) V dijelaskan bahwa “mawas diri” adalah bentuk tidak baku dari “wawas diri”. Jika kita mencari makna dari “wawas diri” pada kamus itu, maka kita akan diminta pula untuk memeriksa makna dari “mewawas diri”. Dalam kamus tersebut, “mewawas diri” bermakna melihat (memeriksa, mengoreksi) diri sendiri secara jujur; introspeksi. Oleh sebab itu, sebaiknya mulai saat ini kita gunakan istilah wawas diri dalam keseharian kita baik dalam percakapan sehari-hari dan atau bentuk komunikasi lainnya.

Contoh penggunaan “wawas diri” dalam kalimat adalah sebagai berikut:

1. Anggota pramuka senantiasa dinasihati untuk wawas diri meski mereka sering berlatih kedisiplinan dan ketangkasan.
2. Kita sebagai makhluk sosial perlu mewawas diri agar lebih memiliki kepekaan sosial terhadap lingkungan sekitar.

Penulisan Kata yang Tepat:

Kata Baku	Kata Tidak Baku	Arti Kata
Frustrasi	Frustasi	rasa kecewa akibat kegagalan di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat tidak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita
Kaus	Kaos	baju yang terbuat dari bahan kaus; kain tipis yang jarang-jarang tenunannya terbuat dari katun atau nilon, digunakan untuk bahan pakaian
Personel	Personil	pegawai; anak buah; awak (kapal, pesawat terbang, dan sebagainya)
Prangko	Perangko	tanda pembayaran biaya pos (biasanya berupa kertas persegi bergambar); ongkos kirimnya telah dibayar oleh pengirim (tentang barang dagangan yang dikirimkan)
Sakelar	Saklar	penghubung dan pemutus aliran listrik (untuk menghidupkan atau mematikan lampu)
Samudra	Samudera	Lautan; besar; raksasa

Senarai Kata Serapan

BENTUK SERAPAN	BENTUK ASAL	ASAL BAHASA	ARTI KATA
Amplop	Enveloppe	Belanda	<ul style="list-style-type: none"> Sampul surat: setelah diketik, surat itu dimasukkan ke dalam – Uang sogok: wartawan seyogianya tidak menerima --
Blangko	Blanco	Belanda	<ul style="list-style-type: none"> Kosong (belum diisi) Tidak memberikan suara (dalam pemungutan suara): yang setuju 116 suara, yang tidak setuju 51 suara, dan yang -- 7 suara Surat isian: -- pos wesel
Esai	Essay	Inggris	Karangan yang tidak membahas suatu masalah secara tidak terlalu mendalam dari sudut pandang penulis sendiri
Kompetensi	Competentie	Belanda	<ul style="list-style-type: none"> Kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu) Kemampuan menguasai gramatika suatu bahasa secara abstrak atau batiniah
Madrasah	Madrasah	Arab	Sekolah atau perguruan (biasanya yang berdasarkan agama Islam)
Paralel	Pararell	Belanda	Sejajar, Mirip
Sertifikat	Certificaat	Belanda	Tanda atau surat keterangan (pernyataan) tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti pemilikan atau suatu kejadian: -- tanah
Sistemis	Sistémis	Inggris	<ul style="list-style-type: none"> Bertalian atau berhubungan dengan suatu sistem atau susunan yang teratur Terdiri atas beberapa subsistem: bahasa adalah struktur yang --
Transparan	Transparant	Inggris, Belanda	<ul style="list-style-type: none"> Tembus cahaya; tembus pandang; bening (tentang kaca): <i>gaunnya merah muda, terbuat dari sutra yang tipis -- sehingga tembus pandang</i> Jernih Nyata; jelas: <i>dalam era reformasi segalanya harus bersifat –</i> Tidak terbatas pada orang tertentu saja; terbuka
Variasi	Variatie	Belanda	<ul style="list-style-type: none"> Tindakan atau hasil perubahan dari keadaan semula; selingan: <i>segalanya berlangsung berulang-ulang tanpa –</i> Bentuk (rupa) yang lain; yang berbeda bentuk (rupa): <i>harga tiket pesawat memang ada --nya; berbagai -- dialek bahasa Indonesia</i>



Jika Anda membutuhkan informasi tambahan secara langsung tentang UN dan USBN 2018, silakan hubungi kami di beberapa layanan berikut:

Sekretariat Ujian Nasional, Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud

Telepon : 021-5737102, 5725031
Surel : sekretariat.un@kemdikbud.go.id

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)

Telepon : 021-7668590
Faksimili : 021-7668591
Handphone : 081519157000
Surel : info@bsnp-indonesia.org
Laman : bsnp-indonesia.org

Unit Layanan Terpadu (ULT) Kemendikbud

Telepon : 021-5703303, 57903020
Faksimili : 021-5733125
SMS : 0811976929
Surel : pengaduan@kemdikbud.go.id
Laman : ult.kemdikbud.go.id

Jika Anda menemukan praktik kecurangan atau penyimpangan lainnya dalam UN dan USBN 2018, silakan sampaikan laporan atau pengaduan tersebut melalui kanal berikut:

Inspektorat Jenderal Kemendikbud

Telepon/Faksimili : 021-5736943
SMS/Whatsapp : 08119958020
Surel : pengaduan.itjen@kemdikbud.go.id
Laman : posko-pengaduan.itjen.kemdikbud.go.id

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (Lapor!)

Telepon : 1708
Laman : lapor.go.id

Sertakan detail informasi dan bukti pendukung agar laporan/pengaduan tersebut lebih cepat ditindaklanjuti.



Indonesia Content
Marketing Awards (ICMA)
2018



Indonesia inhouse
Magazine Awards (InMA)
2018



ISSN: 2502-7867



9 772502 786065

